

MEMBANGUN PARADIGMA Kemaritiman Indonesia

INVENTARIS MILIK
BAGIAN HTN FH UNILA

Pengantar :
Dr. HS. Tisnanta, S.H, M.H

Penulis:

Ahmad Irzal Fardiansyah | Eddy Rifai | Erna Dewi | Fathoni | FX. Adji Samekto | FX. Sumarja
Henri Siswanto | I Gede AB Wiranata | Jimmy Pello | Lufsiana | Maroni
Muhammad Akib | M. Fakhri | Nikmah Rosidah | Rudy

Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia

Ahmad Irzal Fardiansyah | Eddy Rifai | Erna Dewi | Fathoni
FX. Adji Samekto | FX. Sumarja | Heni Siswanto | I Gede AB Wiranata
Jimmy Pello | Lufsiana | Maroni | Muhammad Akib | M. Fakhri
Nikmah Rosidah | Rudy

Editor:
HS Tisnanta



Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia

Penulis:

Ahmad Irzal Fardiansyah, Eddy Rifai, Erna Dewi,
Fathoni, FX. Adji Samekto, FX. Sumarja, Heni
Siswanto, I Gede AB Wiranata, Jimmy Pello, Lufsiana,
Maroni, Muhammad Akib, M. Fakih, Nikmah Rosidah,
Rudy

Editor:

HS Tisnanta

Sampul:

Rio Dermawan

Tata Letak:

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Desember 2014

14 x 21 cm

xiv + 228 hlm

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
All rights reserved

ISBN : 978-602-71788-1-6

Penerbit :

Sai Wawai Publishing

Jl. Ashoka Blok Q7, Perumnas JSP Metro

saiwawai.publishing@gmail.com

081279604790

Bekerjasama dengan

**Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi
Manusia (PKPHAM)**

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pengantar
**Arus Balik: Agar Hukum “Tak
Memunggungi Laut”¹**

HS Tisnanta²

*“Ketika penguasa mengabaikan kekuatan di laut maka nasib Jawa dan Nusantara sudah dapat ditentukan—ambruk entah sampai berapa keturunan.”
(Pramoedya Ananta Toer dalam Arus Balik)*

Indonesia baru saja memulai era kepemimpinan baru setelah terpilihnya Jokowi- JK dalam Pilpres 2014 lalu. Ada hal menarik yang disampaikan Jokowi pada saat pidato pelantikannya, 20 Oktober lalu. Menurut Jokowi, Indonesia telah lama mengabaikan laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk.

Wilayah lautan Indonesia yang luasnya mencapai 3,2 juta kilometer persegi. Panjang pantai yang lebih dari 95.000 kilometer. Indonesia dengan panjang pantai tersebut menempati posisi kedua di dunia setelah Kanada. Juga tentang 240 juta penduduk dan 17.000 pulau dengan sumber daya alam yang beragam. Sebaran pulau-pulau ini dalam bahasa Jokowi sepanjang Kota London hingga Istanbul yang membentang dari Barat ke Timur. Tidak lupa lebih dari 160 juta orang atau lebih dari 60 persen penduduk Indonesia bermukim di pesisir.

Saat mendengar pidato tersebut, penulis kembali pada ingatan masa kecil. Lagu “*Nenek Moyangku orang Pelaut*” adalah lagu yang lekat di telinga masyarakat Indonesia. Lagu ini hendak mengingatkan kita bahwa para leluhur bangsa ini adalah pelaut. Pidato Jokowi seolah hendak mengingatkan kita bahwa setelah 69 tahun negeri ini merdeka, potensi kelautan kita belum digarap secara optimal.

Walhasil, Indonesia adalah negeri yang dibangun dengan amnesia politik dan kekuasaan. Politisi negeri ini berebut makna dan kebenaran untuk mencari dalil publik atas kepentingannya sendiri. Peradaban bangsa hanya menjadi isu yang digulirkan sebagai jargon kampanye, tanpa ada strategi implementasi kebijakan-kebijakan strategis. Amnesia sejarah ini tampak pada cara pandang terhadap warisan mental tentang peradaban maritim.

Bangsa kita sudah terbiasa dengan model, ganti pemimpin ganti kebijakan. Kita tak pernah memiliki satu visi jangka panjang terkait dengan bagaimana membangun visi kemaritiman yang kuat dimana didalamnya terdapat beragam isu yang sangat luas. Bagaimanapun Ciri negara maritim antara lain memiliki kemampuan mengelola laut sebagai sumber kesejahteraan bangsa dan menjadi poros perdagangan dunia.

Perjalanan sejarah bangsa ini dari rezim ke rezim menunjukkan bahwa setiap pemerintahan memiliki cara pandang yang berbeda terkait pengembangan sektor maritim dan kelautan. Dulu presiden RI pertama, Soekarno, sejak 1959 telah memulai mengelola potensi laut Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45/1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda.³ Selanjutnya pada masa Kabinet Dwikora 1964-1966, pembangunan maritim terus diperkuat dengan dibentuknya Kementerian Perindustrian Maritim

Perubahan besar terjadi era Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto yang lebih fokus pada pembangunan darat yang mana mengejar program swasembada pangan. Di era Orde Baru, perhatian pemerintah terhadap maritim menurun drastis. Institusi-institusi negara yang telah dibentuk Presiden Soekarno ditiadakan atau dileburkan dengan

institusi-institusi lain. Perhubungan laut dilebur kepada Departemen Perhubungan. Sumber daya ikan bergabung dengan Departemen. Akibatnya, pelayaran rakyat terpuruk, sumber daya laut kita banyak dicuri asing, dan kerusakan sumber daya alam kian mengkhawatirkan.

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid isu kelautan kembali mendapat perhatian. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai diarahkan pad optimalisasi potensi kelautan. Gus Dur berusaha mengingatkan kembali isu maritim. Namun demikian, dalam era Gus Dur terlihat ada pergeseran isu dari maritim ke isu kelautan. Gus Dur memandang, laut memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan baru ekonomi nasional. Gus Dur memandang laut tidak hanya berpotensi maritim saja—perhubungan laut, pelabuhan, dan kapal—tetapi juga berpotensi sumber daya alam yang belum tergarap optimal. Oleh sebab itu, istilah yang dipakai sejak Gus Dur sampai saat ini adalah kelautan, bukan maritim. Hal ini dimaksudkan memayungi isu sumber daya alam di perairan laut Indonesia.

Kemudian satu dekade era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) isu maritim kembali timbul. Hal tersebut dapat ita lihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dimana pemerintah telah membuat kebijakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Pencanangan budaya bahari dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 diharapkan akan memberikan dampak dalam sistem pelayaran nasional. Namun, dalam persepsi kewilayahan dan kultur maritim masih tumbuh kerancuan identitas karena yang terbangun kemudian adalah sebagai bangsa agraris.⁴

Kini isu tentang maritim kembali didengungkan oleh

Jokowi. Ide Jokowi membangun tol laut seakan hendak membenarkan pandangan sejarawan AB Lopian⁵ dalam karyanya, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut* (2009). AB Lopian menyatakan bahwa Indonesia disatukan oleh laut, bukan dipisahkan oleh laut. Laut merupakan jembatan dan jalan raya (tol) yang menyatukan wilayah-wilayah dan pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 17.800 di negeri ini. Dengan demikian, mental budaya maritim menjadi identitas manusia Indonesia seutuhnya, yang menyatu dengan laut, bukan direduksi oleh nalar daratan.

Proyek Jembatan Sunda sesungguhnya adalah rentetan amnesia sejarah terhadap peradaban maritim. Mega proyek bernilai Rp 200 triliun ini adalah upaya mengukuhkan ambisi penguasa bernalar agraris. Kuatnya nalar daratan tampak dari getolnya pembangunan jembatan antarpulau, tetapi lupa membenahi sektor transportasi dan infrastruktur berbasis maritim.

Penulis tertarik membandingkan Ide Jokowi tentang pembangunan kemaritiman dikaitkan dengan pidato kebudayaan Dr. Hilmar Farid beberapa waktu lalu. Sejarawan muda ini menekankan pentingnya menggunakan perspektif "Sejarah Sebagai Kritik" dalam memberikan pemaknaan terhadap berbagai gagasan yang hendak dibangun. Pidato Kebudayaan Hilmar Farid seakan menjadi penjabaran atas sikap menghadap ke laut atau kembali ke laut yang dikemukakan Jokowi pada pidato pertamanya, 20 Oktober 2014 sesaat setelah dilantik menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia.⁶

Bagaimana Pandangan Orang Hukum?

Sebagai seorang penstudi hukum, penulis memandang menjadi sangat penting untuk belajar sejarah, sosiologi dan berbagai disiplin ilmu lainnya agar mampu memberikan makna

substansial pada produk hukum yang hendak dibangun. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Hilmar Farid dalam konteks pembangunan kemaritiman kita bahwasannya kita *perlu belajar tentang Majapahit, tapi bukan tentang kejayaannya melainkan kejatuhannya yang menimbulkan arus balik yang hebat dalam sejarah.*

Selama ini, belum tergarapnya ekonomi kelautan secara optimal dan rawannya wilayah laut Indonesia dari berbagai tindak kriminal dan pelanggaran kedaulatan tak terlepas dari belum dijadikannya pembangunan kelautan sebagai *mainstream* dalam pembangunan nasional. Ini sebagai akibat budaya maritim kita telah tergerus oleh budaya kontinental-agraris. Oleh karena itu, kepemimpinan nasional yang baru (DPR, DPD, dan presiden, hasil Pileg dan Pilpres 2014) harus mempunyai dorongan politik kuat untuk mengubah orientasi pembangunan dari *land base oriented* menjadi *archipelagic base oriented*.

Masalahnya tentu tidak sekadar mengubah orientasi pembangunan dari *land base oriented* menjadi *archipelagic base oriented*. Juga bukan hanya berkutat pada ide-ide membangun pelabuhan-pelabuhan, industri perkapalan, atau meningkatkan kemampuan tangkap para nelayan secara fisik, tetapi juga menyangkut peraturan dan perundang-undangan yang selama ini tumpang tindih, ego sektoral, dan menyangkut mata rantai simpul pertumbuhan ekonomi dari darat, pesisir, hingga laut lepas.⁷

Sejarah mencatat bahwa proses lahirnya hukum memang tidak lepas dari sejarah kekuasaan atau politik itu sendiri. Sejak masa Imperium Roma sampai dengan Hitler, Sejak masa Sriwijaya hingga Jokowi dalam realitas empiris hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan

hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Dalam kenyataan terlihat bahwa politik dan hukum sangat menentukan bekerjanya sebuah perubahan. Pada konteks inilah studi-studi tentang politik hukum menjadi penting untuk diperhatikan sebagai ikhtiar membangun visi kemaritiman untuk mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang.

Ada baiknya kita merenungi apa yang dikatakan sastrawan besar yang pernah dimiliki Indonesia, Pramoedya Ananta Toer dalam karya monumentalnya *Arus Balik* :

“Semasa jayanya Majapahit, Nusantara merupakan kesatuan maritim dan kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi. Arus bergerak dari selatan ke utara, segalanya: kapal-kapalnya, manusianya, amal perbuatannya dan cita-citanya, semua bergerak dari Nusantara di selatan ke ‘Atas Angin’ di utara. Tapi zaman berubah... „Arus berbalik -- bukan lagi dari selatan ke utara tetapi sebaliknya dari utara ke selatan. Utara kuasai selatan, menguasai urat nadi kehidupan Nusantara... Perpecahan dan kekalahan seakan menjadi bagian dari Jawa yang beruntun tiada hentinya”.

Sekali lagi, malar maritim sesungguhnya hendak membentuk bangsa ini sebagai bangsa petarung, yang berani melawan rezim kolonial. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa runtuhnya visi kepemimpinan berbasis maritim pada gilirannya menjadi senja kala peradaban Nusantara. Bila ini terus dipertahankan, Indonesia akhirnya akan menjadi negeri yang selalu kalah bersaing.

Takdir Indonesia adalah sebagai bangsa maritim. Bangsa ini mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia, yakni sepanjang 95,181 Kilometer persegi. 81% dari luas keseluruhan Indonesia adalah lautan. Total luas lautan Indonesia adalah

3.257.483 kilometer persegi. Bandingkan dengan luas daratan yang “hanya” 1.922.570 Kilometer persegi. Saatnya kita sebagai negara maritim mampu menggunakan dan mengendalikan laut (*sea control*) serta mencegah pihak lain menggunakannya (*sea denial*), sehingga laut dengan segala aspeknya mampu menjadi kekuatan politik dan ekonomi bagi Indonesia. Terkait dengan upaya pengendalian laut tersebut kaitannya dengan *sea power* yang dimiliki suatu negara tidaklah dapat dipisahkan. *Sea power* tidak berarti hanya armada kapal perang saja, tetapi mencakup segala potensi kekuatan nasional yang menggunakan laut sebagai wahananya, seperti penegak hukum di laut, armada kapal niaga, pelabuhan, serta industri dan jasa maritim.

Artikel singkat ini hanyalah pengantar dari buku kumpulan tulisan para kolega Dr. Heryandi S.H.M.S dalam menyambut pengukuhan Guru Besar-nya. Semoga lewat kumpulan tulisan ini akan memberikannya perspektif baru bagi kita semua dalam rangka pengembangan ilmu. Tak lupa editor mengucapkan terimakasih kepada seluruh kontributor tulisan yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya.

Bandar Lampung, November 2014

HS Tisnanta

catatan kaki

¹Tulisan pengantar untuk buku kumpulan yang didedikasikan untuk menghormati pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung